



Implementation of the Integrated Stunting Reduction Acceleration Program at the Wonogiri District Health Office

Salma Nur Farida¹, Iik Sartika², Syefira Ayudia Johar³

Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara

Corresponding Author: Salma Nur Farida salmanurfrd@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Program
Implementation, Stunting
Reduction, Integrated

Received : 10, June

Revised : 16, July

Accepted: 23, August

©2023 Farida, Sartika, Johar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Stunting remains a global concern, affecting children's cognitive development and health. One of the districts that experienced an increase in the prevalence of stunting based on the SSGI results is Wonogiri Regency where in 2021 it was 14% while in 2022 it became 18%. This study aims to analyze the implementation of an integrated stunting reduction acceleration program at the Wonogiri Regency Health Office. This research is a qualitative descriptive study. Data collection using in-depth interviews, observation, and documentation. Validation in this study used source triangulation and method triangulation. The research findings, based on the Van Meter and Van Horn implementation model analysis, indicate that aspects of policy size and objectives, inter-organizational communication and implementing activities, agency characteristics, and implementing dispositions have been successful. However, there are still some aspects that have not been achieved well, such as the lack of financial resources provided and the economic and social conditions of the community that do not fully support the success of the integrated stunting reduction acceleration program. Based on this research, it is hoped that the Health Office will further strengthen the budget, especially for program targets and the community can be more cooperative in participating in activities, especially programs related to stunting prevention.

Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Salma Nur Farida¹, Iik Sartika², Syefira Ayudia Johar³

Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara

Corresponding Author: Salma Nur Farida salmanurfrd@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi Program, Penurunan Stunting, Terintegrasi.

Received : 10, Juni

Revised : 16, Juli

Accepted: 23, Agustus

©2023 Farida, Sartika, Johar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Stunting masih menjadi isu global dan tidak layak diabaikan karena berdampak pada rendahnya kemampuan intelektual anak, kapasitas belajar, serta risiko penyakit kronis seperti diabetes, morbiditas, dan mortalitas. Salah satu Kabupaten yang mengalami kenaikan prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI yaitu Kabupaten Wonogiri dimana tahun 2021 sebesar 14% sedangkan di tahun 2022 menjadi 18%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program percepatan penurunan stunting terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Validasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian berdasarkan analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan, aspek komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, aspek karakteristik badan pelaksana, dan aspek disposisi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai dengan baik seperti sumber daya finansial yang disediakan masih kurang serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting terintegrasi. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan Dinas Kesehatan lebih memperkuat anggaran khususnya bagi sasaran program serta masyarakat dapat lebih kooperatif dalam mengikuti kegiatan khususnya program yang berkaitan dengan penanggulangan stunting.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan komitmen global, Indonesia turut serta dalam upaya bersama untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang memiliki prinsip utama “*leave no one behind*” atau tidak meninggalkan satu orang pun (Cahyadi, Parlinggomon and Kawuryan, 2021). Selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu direalisasikan. Salah satu fokus utama SDGs adalah masalah stunting yang sampai saat ini masih menjadi isu global karena menjadi penyebab 2,2 juta kematian balita di seluruh dunia (Apriluana and Fikawati, 2018). Sehingga pemerintah memprioritaskan pencapaian tujuan SDGs melalui pemenuhan target nutrisi global (WHO, 2018). Demi mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan RI menggencarkan program cegah stunting dengan menargetkan penurunan stunting sebesar 14% di tahun 2024 (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui hasil SSGI, pada tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah masih mencapai 20,8% dan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan prevalensi stunting dimana pada tahun 2021 sebesar 14% menjadi 18% pada tahun 2022 (Kemenkes RI, 2023). Prevalensi tersebut berbeda dengan data dari EPPBGM yang menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 12,85% menjadi 10,6% di tahun 2022 (Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, 2023) sehingga hal tersebut membuat rancu dan membingungkan. Meski demikian, hingga saat ini stunting masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Wonogiri bahkan menargetkan Wonogiri zero stunting pada tahun 2024 (Kemensesneg RI, 2022).

Mengingat bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2035, tentunya hal tersebut tidak layak diabaikan karena stunting dapat berdampak pada rendahnya kemampuan intelektual anak, kapasitas belajar, serta risiko penyakit kronis seperti diabetes, morbiditas, dan mortalitas (Ananda, 2019). Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, stunting dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia (Rised, 2020). Studi komparatif internasional menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara prevalensi stunting dan produktivitas ekonomi sehingga mengakibatkan hilangnya 11% *Gross Domestic Product* (GDP) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20% (Imani, 2020). Tanpa penanganan yang serius, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan, memperparah kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan sosial (TNPK, 2017). Apabila angka stunting saat ini masih tinggi, maka dapat dipastikan bonus demografi menjadi sia-sia karena usia produktif akan berkurang tingkat reproduktifitasnya (Dewi, Listyowati and Napitupulu, 2018).

Keseriusan pemerintah dalam menghadapi stunting dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Forum Komunikasi Publik yang

membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dimana dalam sambutan pengarahannya, Bupati Wonogiri menekankan pada 4 (empat) permasalahan yang harus dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2024 salah satunya adalah penanganan stunting (Pemerintah Wonogiri, 2023).

Pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi khususnya dalam urusan kesehatan di Kabupaten Wonogiri juga melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat (STBM). Tahun 2021 hingga tahun 2022, leading sector dalam program ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sedangkan tahun 2023 yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKBP3A). Meski demikian, peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri karena ingin melihat secara terintegrasi.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tergantung pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan, aspek sumber daya, aspek komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, aspek karakteristik badan pelaksana, aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta aspek disposisi. Jika beberapa hal tersebut tidak cukup, maka program tidak akan berjalan dengan baik. Hasil studi yang dilakukan oleh Nabila Udzrotu Shauma dan Dini Gandini Purbaningrum (2022) menyoroti beberapa kendala dalam implementasi program percepatan pencegahan stunting. Beberapa masalah utama yang ditemukan meliputi kekurangan dan kualitas kader kesehatan yang tidak memadai, kelemahan dalam struktur organisasi pelaksana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, serta koordinasi yang belum optimal. Selain itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut menghambat keberhasilan program (Shauma and Purbaningrum, 2022).

Pada survey pendahuluan yang didapatkan mengenai adanya perbedaan data prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri antara pusat dan daerah yang menyebabkan penekanan kasus stunting hingga zero pada 2024 terkendala data, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai program penanganan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan mengangkat judul penelitian, "Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri."

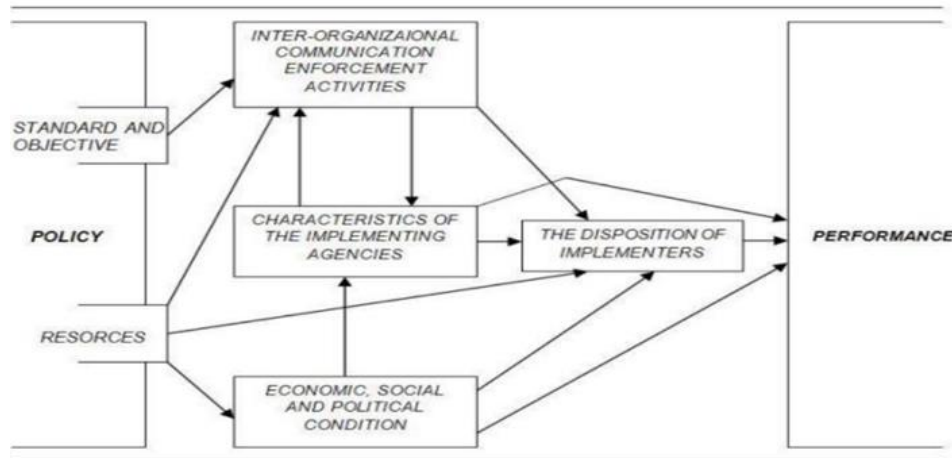
TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan kesehatan merupakan suatu rangkaian keputusan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan status kesehatan masyarakat secara optimal (Budiyanti, Sriatmi and Jati, 2020).

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada 2 (dua) opsi implementasi kebijakan publik dari langkah-langkah yang ada, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program atau dengan merumuskan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Pramono, 2020).

Pada pendekatan top-down faktor yang mempengaruhi implementasi dipaparkan oleh Van Meter Van Horn (1975), Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian (1979), George Edward III. Sedangkan pada pendekatan bottom up, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya identifikasi faktor dan organisasi dengan sasaran dikemukakan oleh Lipsky (1971), Wetherly (1977), Smith (1973) (Budiyanti, Sriatmi and Jati, 2020).

Model yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengendalikannya bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model ini mencakup 6 (enam) variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn
(Hartawan, Kosasih and Rochmani, 2023)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model teoritis Van Meter dan Van Horn karena dianggap sesuai dan berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji. Teori Van Meter dan Van Horn mudah dimengerti dan cocok dalam menilai kesuksesan program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 HPK yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan (Wirawan, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi manifestasi komitmen pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga turut berkontribusi melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 yang secara khusus menyoar penurunan prevalensi stunting di wilayahnya. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah telah

mengimplementasikan kebijakan yang lebih spesifik melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021. Peraturan Bupati ini secara komprehensif mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan tujuan untuk mencapai penurunan stunting secara signifikan melalui berbagai program yang menyoar kelompok rentan, mulai dari remaja putri hingga anak usia dini.

Instrumen pendukung kebijakan untuk percepatan penurunan stunting sudah cukup lengkap. Kebutuhan saat ini adalah upaya dalam implementasi yang terorganisir dan dapat diterapkan di semua tingkatan oleh setiap elemen yang terlibat. Penurunan kasus stunting harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dengan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas (Masan, 2021).

METODOLOGI

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan didasarkan pada model pendekatan Van Meter dan Van Horn. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pada pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan. Informan tersebut diantaranya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, dan Petugas Gizi Puskesmas (1 orang). Data yang didapatkan kemudian diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penulis juga mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen seperti peraturan ataupun arsip yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta foto sebagai bukti kegiatan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek ukuran dan tujuan kebijakan, aspek sumber daya, aspek komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, aspek karakteristik badan pelaksana, aspek kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta aspek disposisi pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi melalui dibentuknya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi hingga tahun 2024, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Kebijakan percepatan penurunan

stunting terintegrasi dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi dan untuk mendukung pencapaian target antara percepatan penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Kebijakan yang telah dibuat diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan untuk mencegah terjadinya lost generation serta menyiapkan generasi muda sebagai generasi penerus agar menjadi SDM Indonesia yang tidak terbelakang dan mampu berkontribusi secara go international.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilakukan secara terintegrasi atau berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bukan hanya dari sektor kesehatan saja karena permasalahan stunting yang sangat kompleks sehingga dalam mengimplementasikan program ini harus dilakukan secara bersama-sama. Dinas Kesehatan dalam hal ini berfokus secara eksklusif pada urusan kesehatan seperti pemantauan tumbuh kembang balita, penyediaan gizi untuk menunjang keberlangsungan program, mengatasi penyakit yang ada pada balita, penyakit menular, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, hingga kesehatan remaja. Sedangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya menjadi urusan sektor lain.

Berkenaan dengan sasaran program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, upaya ini melibatkan dua jenis pendekatan, yaitu intervensi langsung pada penyebab stunting (intervensi gizi spesifik) dan intervensi pada faktor-faktor yang mempengaruhi stunting (intervensi gizi sensitif). kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Karena seiring berjalannya waktu, hasil dari penelusuran para tenaga kesehatan disimpulkan bahwa yang mempengaruhi kejadian stunting ternyata disebabkan sejak remaja. Sehingga pada saat ini, Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak Puskesmas sebagai pelaksana yang langsung bersinggungan dengan sasaran program cukup fokus melakukan intervensi kepada para remaja.

Tolak ukur keberhasilan dari program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi berdasarkan hasil wawancara juga cukup jelas yaitu angka penurunan stunting. Ditargetkan pada awal tahun 2024 Kabupaten Wonogiri tidak lagi menemukan kasus stunting yang baru atau zero stunting. Demi mencapai target tersebut, hal yang dilakukan pertama adalah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Tentunya kegiatan yang telah dilaksanakan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Biasanya, evaluasi dilaksanakan secara internal di tingkat Puskesmas kemudian setelah mencapai final pembahasan akan disampaikan pada forum koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan dengan frekuensi triwulanan.

Hasil wawancara dengan para informan kemudian disandingkan dengan hasil observasi, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri tidak memiliki dokumen rencana program/rencana kerja untuk dibahas dalam rembuk stunting karena dokumen tersebut berada di BAPPEDA. Akan tetapi, Dinas

Kesehatan Kabupaten Wonogiri memiliki dokumen capaian intervensi gizi spesifik dan dokumen rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil data primer yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Diperoleh data bahwa para pelaksana, khususnya OPD telah memahami dan melakukan pendekatan lintas sektoral. Sejalan dengan temuan penelitian Dian Rosa Sunaryo, Candradewini dan Ria Arifianti bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus terukur dan jelas sehingga dapat terealisasi (Sunaryo, Candradewini and Arifianti, 2022).

2. Sumber Daya

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan suatu program. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial (pendanaan) untuk melaksanakan implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset paling berharga yang dimiliki suatu organisasi, menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi dan mencapai tujuan (Noviyanti, 2022). Sumber daya manusia yang terlibat berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang kemudian mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya secara resmi kepada seluruh OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, hingga Para perangkat yang ada di Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada urusan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, SDM yang terlibat dalam implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dan seluruh pegawai yang ada di Puskesmas. Semua SDM yang ada terlibat karena program ini merupakan program prioritas nasional dan sebagai salah satu program kerja Bupati Wonogiri. Tetapi memang dalam mengatasi stunting tetap berdasarkan kompetensinya masing-masing. Seperti di Dinas Kesehatan bagian gizi mengurus gizinya, bagian kesehatan lingkungan mengurus bagaimana penyehatan lingkungannya, bagian promosi kesehatan bagaimana mengedukasi masyarakat, bagian pencegahan pengendalian penyakit mengurus bagaimana penularan penyakitnya. Sebagaimana yang ada di Puskesmas dimana semua juga terlibat dalam

implementasi program ini mulai dari Kepala Puskesmas, petugas gizi, UKM, dan sebagainya. Bahkan dari pihak Puskesmas juga turut berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun Desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa SDM yang ada sudah memenuhi. Hal ini terlihat pada pembagian tugas pegawai dalam pelaksanaan program yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing.

Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri didukung oleh berbagai sumber pendanaan, seperti DAK non fisik, BOK, dana desa, serta sumber-sumber lain yang legal. Berkaitan dengan hal ini, pihak dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk penanganan stunting dari APBD yang langsung menuju ke sasaran program. Apabila didasarkan pada wawancara, anggaran sebagaimana tercantum pada tabel 7 merupakan anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk koordinasi di tingkat kabupaten yakni 8 (delapan) Aksi Integrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan apabila untuk mengentaskan masalah stunting maka anggaran yang ada belum cukup. Sesuai temuan penelitian Sari Paulina Haloho dkk., ketersediaan anggaran yang memadai merupakan kunci keberhasilan implementasi program. Defisit anggaran dapat berdampak negatif pada efektivitas program (Haloho, Lengkong and Pombengi, 2023).

3. *Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana*

Implementasi program sangat dipengaruhi oleh kinerja para pelaksana serta keberadaan mekanisme dan prosedur yang jelas. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting yaitu rembuk stunting. Koordinasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh OPD.

Kolaborasi antar unit kerja perangkat daerah (OPD) terlihat dari partisipasi aktif para pelaksana program dalam pertemuan tatap muka. Selain itu, pemanfaatan platform digital seperti Zoom Meeting dan WhatsApp telah meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi. Pada urusan kesehatan, integrasi lebih terlihat antara Puskesmas dengan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan dimana hal tersebut pada akhirnya melahirkan inovasi-inovasi untuk kegiatan percepatan penurunan stunting.

4. *Karakteristik Badan Pelaksana*

Van Meter dan Van Horn (dalam Hartawan, Kosasih, and Rochmani, 2023) menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana. Struktur birokrasi, yang mencakup norma, pola interaksi, dan hubungan antar bagian dalam organisasi, berperan krusial dalam membentuk kapasitas organisasi dalam menjalankan kebijakan. Hal ini mencakup kompetensi personel, dukungan stakeholder, mekanisme pengawasan, serta kualitas komunikasi eksternal (Indriyani, Ibrahim and Sarpin, 2022). Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dari wawancara mendalam dengan para implementor, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, para pelaksana kebijakan pada level atas seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri memiliki struktur organisasi yang hirarkis, dengan pembagian bidang dan sub-koordinator, bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi kerja. Setiap individu dalam struktur tersebut memiliki keahlian spesifik yang memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensinya.

Kedua, di level bawah seperti Kecamatan dan Desa sebagai wilayah kerja Puskesmas, pelaksanaan kegiatan kesehatan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi berbeda-beda. Kolaborasi multisektoral ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program.

Ketiga, berkaitan dengan banyaknya kegiatan dalam program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 khususnya dalam urusan kesehatan masih terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan optimal, salah satunya adalah PMT kepada sasaran program dikarenakan adanya kendala pada anggaran yang telah dianggarkan di awal seperti penyeteraan intervensi setiap anak 90 hari namun pada kenyataannya perkembangan setiap anak berbeda. Selain itu terkait dengan pemberian tablet tambah darah yang pada tahun ini belum ada droping dari pusat sehingga belum dapat melaksanakan pendistribusian tablet tambah darah.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kegiatan yang belum dijalankan secara optimal karena terkendala pada anggaran maupun belum adanya droping dari pusat, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pada kegiatan yang lain khususnya dalam urusan kesehatan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dukungan dari lingkungan sosial, ketersediaan sumber daya, serta pengaruh politik merupakan komponen penting yang dapat mempercepat atau menghambat proses implementasi (Priyanto and Noviana, 2018).

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa aspek kondisi ekonomi, sosial maupun politik ternyata cukup berpengaruh dalam implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi khususnya dalam hal ini adalah masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lingkungan sosial terhadap program yang dilaksanakan masih perlu diperhatikan karena istilah stunting sendiri masih menjadi permasalahan sensitif dikalangan masyarakat sehingga diperlukan penjelasan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap program ini terbilang positif, meskipun sebagian kecil masyarakat kurang terlibat aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program tersebut.

Terkait dengan konteks ekonomi, dana desa dan anggaran daerah telah dialokasikan untuk mendukung upaya penanganan stunting. Kabupaten Wonogiri memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berada di ujung selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan keadaan alam daerahnya untuk bergerak secara mandiri dalam bercocok tanam sehingga dapat lebih menganekaragamkan bahan makanan. Dalam konteks politik, baik pemerintah daerah, desa, maupun dinas terkait terus berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan stunting.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana program, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program. Ketiga dimensi disposisi, yaitu pemahaman, penerimaan, dan intensitas komitmen, menjadi variabel kunci yang memengaruhi seberapa jauh tujuan kebijakan dapat tercapai (Indriyani, Ibrahim and Sarpin, 2022).

Pelaksana program memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan program. Keberhasilan program sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana memahami tujuan program dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Ani and Sulistio, 2017).

Pada konteks percepatan penurunan stunting terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dari keberlanjutan program yang telah dan sedang dilaksanakan, serta adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terstruktur.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian tentang implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan kesesuaian dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap indikator keberhasilan untuk mengukur efektivitas program secara komprehensif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia untuk program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonogiri sudah cukup. Akan tetapi, keterbatasan anggaran yang tidak langsung ditujukan kepada sasaran program menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Komunikasi antar stakeholder telah terjalin dengan baik serta perlu untuk tetap memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi program.

4. Tugas dan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dalam program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati, namun perlu dipastikan bahwa institusi memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang gizi, menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Selain itu, konteks politik yang mendukung juga sangat penting untuk keberlangsungan program jangka panjang.
6. Para implementor saling berkolaborasi dan memiliki komitmen terhadap keberlangsungan program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonogiri.

Kendala yang disampaikan oleh informan maka ada beberapa hal yang bisa peneliti ajukan untuk menjadi saran perbaikan bagi kelancaran program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yaitu diharapkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terutama mengenai perbaikan kondisi sosial terkait pola asuh dan merencanakan anggaran program secara lebih spesifik. Bagi Puskesmas diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan mulai dari para remaja, calon pengantin hingga orang tua bayi mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting khususnya berkaitan dengan pola asuh dan memberikan penjelasan mengenai penganeekaragaman bahan makanan untuk keluarga. Bagi Masyarakat diharapkan untuk lebih kooperatif dalam mengikuti kegiatan khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan penanggulangan stunting yang dijalankan oleh pemerintah dan mengutamakan penganeekaragaman bahan makanan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih mendalam terkait program percepatan penurunan stunting terintegrasi di Dinas-dinas lain yang terkait khususnya *leading sector* dalam program ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S. *et al.* 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Adjunct and Marniati. 2021. *Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan, Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan*. Depok: Rajawali Press.
- Ananda, C. F. 2019. *Polemik Stunting dan Pembangunan*. Available at: <https://feb.ub.ac.id/id/polemik-stunting-dan-pembangunan.html>.

- Ani, S. and Sulistio, E. B. 2017. Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(1).
- Apriluana, G. and Fikawati, S. 2018. Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Litbangkes*, 28(4), pp. 247-256.
- Ayuningtyas, D. 2019. *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bappenas. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting di kabupaten/Kota*. Jakarta: Bappenas.
- Budiyanti, R. T., Sriatmi, A. and Jati, S. P. 2020. *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan*, Depok: Departemen AKK FKM UI. Semarang: Undip Press.
- Cahyadi, F., Parlinggomon, B. T. P. and Kawuryan, D. A. 2021. Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs Indonesia. *Internation NGO Forum on Indonesian Development*.
- Cahyania, D. 2018. Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada PT Deltra Wijaya Konsultan. *Jurnal Komunikasi*, pp. 20-27.
- Dewi, S., Listyowati, D. and Napitupulu, B. E. 2018. Bonus Demografi di Indonesia: Suatu Anugrah Atau Tantangan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 2(3), pp. 17-23.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. 2023. *Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Rencana Kegiatan 2023*.
- Haloho, S. P., Lengkong, F. D. J. and Pombengi, J. D. 2023. Implementasi Program Elektronik Kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(2), pp. 84-94.
- Hardianto, H. N. 2022. *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2021*. Universitas Nasional.
- Hartawan, R. C., Kosasih, F. and Rochmani. 2023. Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4).
- Imani, N. 2020. *Stunting Pada Anak: Kenali dan Cegah Sejak Dini*. Yogyakarta:

Hikam Media Utama.

- Indriyani, I. N., Ibrahim and Sarpin. 2022. Implementation The Policy of Prevention and Stunting Management (Study of Regional Regulation Number 7 of 2021 Concerning Prevention and Stunting Management in South Bangka). *Social Science Studies*, 2(6), pp. 487-509.
- Kasmad, R. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara. Available at: www.gavamedia.net.
- Kemendikbud Ristek. 2022. *KBBI Daring*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kemenkes RI. 2020. Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020-2024. *Kementerian Kesehatan RI*, 2(1), pp. 1-33.
- Kemenkes RI. 2023. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. pp. 1-7.
- Kemensesneg RI. 2022. *Target 2024 Zero Stunting, Bupati Wonogiri Petakan Kasus untuk Percepat Penanganan*.
- Masan, L. 2021. Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Balita. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 58-62. doi: 10.25008/altifani.v1i1.121.
- Mubarok, S. et al. 2020. Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), pp. 33-38. doi: 10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7.
- Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviyanti, A. D. 2022. *Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan STunting Oleh Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Pemerintah Wonogiri. 2023. *Forum Komunikasi Publik Rencana Awal RKPD, Pemerintah Kabupaten Wonogiri Fokus Tangani Empat Hal*, Available at: <https://wonogirikab.go.id/> (Accessed: 29 January 2023).
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Pomalingo, N. 2019. Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo. 3(1), pp. 1-54.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Priyanto, H. and Noviana, N. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1).
- Purnama, N. P. et al. 2021. Health Policy Formulation Process: Problem Formulation, Formulation, Implementation, Monitoring, and Evaluation: Literature Review. pp. 43-50.
- Rahayu, A. et al. 2018. *Study Guide : Stunting dan Upaya Pencegahannya, Buku stunting dan upaya pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine.
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), p. 81. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Rised. 2020. *Stunting Ancaman Bagi Ekonomi Indonesia*. Available at: <https://rised.or.id/stunting-ancaman-bagi-ekonomi-indonesia/>.
- Satispi, E. and Taufiqurokhman. 2018. *Design Dalam Kebijakan Publik, Researchgate.Net*. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- Shauma, U. N. and Purbaningrum, D. G. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), pp. 97-104.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd edn. Edited by S. Y. Suryandari. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sunaryo, D. R., Candradewini and Arifianti, R. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 4(4), pp. 205-213.
- Susanti, D. F. 2022. Mengenal Apa Itu Stunting. *Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*.

- TNPK. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1, pp. 50-60.
- UNICEF, WHO and The World Bank. 2021. Levels and Trends in Child Malnutrition. *World Health Organization*, pp. 1-32.
- Vionalita, G. 2020. Modul Analisis Kebijakan Kesehatan. *Analisis Kebijakan Kesehatan (KAK 471)*, (Analisis kebijakan dan Informasi relevan), pp. 0-19.
- WHO. 2018. *Reducing Stunting In Children: Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*.
- Wirawan, S. 2022. *Tata Laksana Penanganan Stunting*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, pp. 25-42.